

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata Nomor xx tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PEROLEHAN STATUS AKREDITASI UNGGUL

PROGRAM SARJANA TERAPAN

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
JAKARTA
2025**

Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Akreditasi Unggul Program Sarjana Terapan

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
A. BUDAYA MUTU							
MASUKAN							
1	Penjaminan Mutu	<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan nonakademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam penjaminan mutu, 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu. 	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.	UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.
PROSES							
2	Siklus Implementasi SPMI	<p>Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Perguruan Tinggi (PT), 2) pelaksanaan standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai, 3) evaluasi pemenuhan standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan 	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4, didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3, didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar	UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI; didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		<p>standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya,</p> <p>4) pengendalian pelaksanaan standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya,</p> <p>5) peningkatan standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan.</p>				pendidikan tinggi, didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.	
3	Dewan Penasehat Industri (<i>Industry Advisory Board</i>)	<p>UPPS:</p> <p>1) Memiliki Dewan Penasihat (<i>Advisory Board</i>) dari industri atau melaksanakan konsultasi dengan beberapa perwakilan pihak industri terpilih yang relevan dengan Program Studi (PS),</p> <p>2) Memiliki kerangka acuan (susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab atau agenda kerja),</p> <p>3) Melaksanakan pertemuan secara periodik minimal satu tahun sekali.</p>	UPPS memiliki 3 aspek terkait Dewan Penasihat Industri (<i>Industry Advisory Board</i>) yang dibuktikan dengan dokumentasi yang jelas.	UPPS memiliki 2 dari 3 aspek terkait Dewan Penasihat Industri (<i>Industry Advisory Board</i>) yang dibuktikan dengan dokumentasi yang jelas.	UPPS memiliki 1 dari 3 aspek terkait Dewan Penasihat Industri (<i>Industry Advisory Board</i>) yang dibuktikan dengan dokumentasi yang jelas.	UPPS memiliki minimal 1 dari 3 aspek terkait Dewan Penasihat Industri (<i>Industry Advisory Board</i>), namun tanpa didukung dengan dokumentasi yang jelas.	UPPS tidak memiliki <i>Dewan Penasihat Industri (Industry Advisory Board)</i> .
LUARAN							

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
4	Laporan Implementasi SPMI	UPPS memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat UPPS dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasinya melalui laman yang ditentukan oleh Pendidikan Tinggi (Dikti).	UPPS memiliki bukti laporan implementasi SPMI yang lengkap, rutin, dianalisis secara komprehensif, dilaporkan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis.	UPPS memiliki bukti laporan implementasi SPMI yang lengkap dan rutin, dianalisis secara komprehensif, dilaporkan, namun belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis.	Tidak ada nilai 2.	Tidak ada nilai 1.	UPPS tidak melaporkan implementasi SPMI.
DAMPAK							
5	Pengakuan Mutu Pendidikan	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal 1 akreditasi/sertifikasi internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal 1 akreditasi/sertifikasi nasional.	Tidak ada nilai 2.	PT/UPPS/PS tidak memiliki akreditasi/sertifikasi dari lembaga lain.	Tidak ada nilai 0.
B.1. RELEVANSI PENDIDIKAN							
MASUKAN							
6	Kebijakan dan Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kurikulum Outcome Based Education (OBE).	UPPS memiliki kebijakan, pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) OBE yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), 2) penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 4) penerapan metode pembelajaran sistem ganda (Dual System, Teaching Industry/ Factory), pada DUDI dan PT,	UPPS memiliki kebijakan dan pedoman yang komprehensif, efektif dan terintegrasi, mencakup 7 aspek.	UPPS memiliki kebijakan dan pedoman yang komprehensif, efektif dan terintegrasi, mencakup 5-6 aspek.	UPPS memiliki kebijakan dan pedoman yang komprehensif, efektif dan terintegrasi, mencakup 3-4 aspek.	UPPS memiliki kebijakan dan pedoman yang komprehensif, efektif dan terintegrasi, mencakup 1-2 aspek.	UPPS tidak memiliki kebijakan atau pedoman.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		5) pendidikan anti korupsi, 6) pemenuhan beban belajar di luar PS, 7) magang di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait dan industri.					
7	Pendidikan - Kurikulum	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direviu oleh pakar bidang ilmu PS, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan kebutuhan pengguna.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS.
		B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).	Capaian Pembelajaran (CP) diturunkan dari profil lulusan, mengacu kepada capaian pembelajaran minimum PS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikisaintek) dan Himpunan Lembaga Pendidikan	CP diturunkan dari profil lulusan, mengacu kepada CP minimum PS yang ditetapkan oleh Kemendikisaintek dan Hildiktipari, memenuhi KKNI level 6, serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan	CP diturunkan dari profil lulusan, mengacu kepada CP minimum PS yang ditetapkan oleh PT/Upps/PS dan setara dengan KKNI level 6.	CP diturunkan dari profil lulusan, mengacu kepada CP minimum PS yang ditetapkan oleh PT/Upps/PS namun tidak setara dengan KKNI level 6.	CP tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
			<p>Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari) atau mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, memenuhi KKNI level 6, terdapat butir CP yang dikembangkan sendiri dan menandakan diferensiasi atau keunggulan PS dan UPPS, serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan PS.</p>	<p>kebutuhan pengguna lulusan PS.</p>			
		<p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan CP.</p>	<p>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta tidak ada CPMK yang tidak mendukung</p>	<p>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK.</p>	<p>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.</p>	<p>Struktur kurikulum tidak sesuai dengan CPL.</p>	<p>Tidak ada nilai 0.</p>

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0	
			CPL.					
			$Skor = ((A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$					
8	Rencana Proses Pembelajaran (RPP)	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Dokumen RPS mencakup target CP, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil CP. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS mencakup target CP, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil CP. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.	Dokumen RPS mencakup target CP, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil CP. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	Dokumen RPS mencakup target CP, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil CP atau tidak semua mata kuliah memiliki RPS.	Tidak memiliki dokumen RPS.	
		B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL, serta ditinjau ulang secara berkala.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL.	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL.	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan CPL.	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan CPL.	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		$Skor = (A + (2 \times B)) / 3$					
9	Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	PT/UPPS/PS memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh institusi terkait. A. Ketersediaan Dosen/Tenaga Pendidik yang berkompoten dan berkualifikasi pada Tahun Sekarang (TS).	PT/UPPS/PS memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang lengkap dan terperinci, dengan analisis kecukupan, kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman dosen/tenaga pendidik yang relevan dan sesuai kebutuhan yang disertai implementasi yang efektif.	PT/UPPS/PS memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang mencakup analisis kecukupan dan penyediaan dosen/tenaga pendidik sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal.	PT/UPPS/PS memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang mencakup analisis kecukupan kualifikasi dan kompetensi dosen/tenaga pendidik, tetapi belum sesuai kebutuhan spesifik dari institusi terkait.	PT/UPPS/PS memiliki rencana strategis pengelolaan SDM, tetapi hanya mencakup sebagian kebutuhan kualifikasi dan kompetensi dosen/tenaga pendidik tanpa analisis kecukupan yang jelas.	PT/UPPS/PS tidak memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang memuat analisis kebutuhan atau kecukupan dosen/tenaga pendidik sesuai kualifikasi dan kompetensi.
		B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PT/UPPS/PS Terkait.	PT/UPPS/PS memiliki tenaga kependidikan yang sangat memadai dalam jumlah, kompetensi, dan pengelolaan, yang mampu melaksanakan semua fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis	PT/UPPS/PS memiliki tenaga kependidikan yang mencukupi secara jumlah dan kompetensi, serta dapat melaksanakan sebagian besar fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai kebutuhan.	PT/UPPS/PS memiliki tenaga kependidikan yang memadai secara jumlah, tetapi kompetensi dan pengelolaan mereka belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.	PT/UPPS/PS memiliki tenaga kependidikan, tetapi jumlah dan kompetensi, serta peran mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis dasar.	Tidak ada nilai 0

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
			secara efektif dan sesuai kebutuhan.				

DRAFT

		<p>C. Jumlah mahasiswa aktif dibagi jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) saat TS.</p> <p>Catatan: RMDTPS = NM / NDTPS NM = Jumlah mahasiswa pada Program Sarjana pada saat TS. Tabel 1 DAPS NDTPS = Jumlah DTPS yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS yang diakreditasi.</p>	RMDTPS berada di antara $15 \leq x \leq 25$, menunjukkan rasio ideal untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas dan efisien.	RMDTPS berada di antara $25 < x \leq 35$, mencerminkan rasio yang cukup baik tetapi masih memerlukan penyempurnaan untuk mendukung pembelajaran yang optimal.	RMDTPS berada di antara $35 < x \leq 45$, mencerminkan rasio yang mulai mendekati keseimbangan tetapi masih memerlukan penyesuaian untuk mencapai standar ideal.	RMDTPS berada kurang dari 15, atau lebih dari 45, mencerminkan ketidakseimbangan yang signifikan, baik karena jumlah dosen terlalu banyak atau jumlah dosen terlalu sedikit.	Tidak ada nilai 0
$\text{Skor} = ((2 \times A) + B + (2 \times C)) / 5$							
10	Kecukupan NDTPS	Kecukupan NDTPS. Tabel 1 DAPS	Jika $\text{NDTPS} \geq 6$, maka Skor = 4	Jika $3 \leq \text{NDTPS} < 6$, maka Skor = $(2 \times \text{NDTPS}) / 3$	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika $\text{NDTPS} < 3$, maka Skor = 0	
11	Kualifikasi akademik DTPS - Pendidikan Doktor	Kualifikasi akademik DTPS - Pendidikan Doktor Tabel 1 DAPS	Jika $\text{PDS3} \geq 50\%$, maka Skor = 4	Jika $\text{PDS3} < 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times \text{PDS3})$	Tidak ada Skor kurang dari 2		
			<p>NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>				
$\text{Skor PDS3} = (\text{NDS3} / \text{NDTPS}) \times 100\%$							
12	Latar Belakang pendidikan DT	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) Tabel 1 DAPS	$\geq 40\%$ DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS	$20\% \leq \text{DT} < 40\%$, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS	$10\% \leq x < 20\%$ dari DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS	DT < 10% memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS	Tidak ada DT yang memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS

13	Latar Belakang Pendidikan DTPS	<p>Kualifikasi akademik terakhir/tertinggi DTPS. NDTPS = Jumlah DTPS Program Studi NLDTPS = Jumlah DTPS yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir/tertinggi yang linear dan sesuai dengan kompetensi inti PS disemua jenjang pendidikan.</p> <p>$PDTPSL = (NLDTPS / NDTPS) \times 100\%$ Tabel 1 DAPS</p>	Jika PDTPSL $\geq 40\%$	Jika $20\% \leq PDTPSL < 40\%$	Jika $10\% \leq PDTPSL < 20\%$	Jika PDTPSL $< 10\%$	Tidak ada PDTPSL
		$Skor = (NLDTPS / NDTPS) \times 100\%$					
14	Sertifikasi DTPS	<p>Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTPS yang relevan dengan bidang PS. NDSK = Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri yang sesuai dengan kompetensi inti PS/relevan dengan bidang PS. Tabel 1 DAPS</p>	PDSK $\geq 50\%$ maka skor 4	PDSK $< 50\%$, maka skor = $1 + (6 \times PDSK)$			Tidak ada skor < 1
		$Skor = (NDTPSK / NDTPS) \times 100\%$					
15	Jabatan Akademik DTPS	<p>Jabatan akademik DTPS. NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. ND = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + ND) / NDTPS) \times 100\%$ Tabel 1 DAPS</p>	Jika PGBLKL $\geq 70\%$, maka Skor = 4	Jika PGBLKL $< 70\%$, maka Skor = $2 + ((20 \times PGBLKL) / 7)$			Tidak ada Skor kurang dari 2.

		Skor PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%				
16	Keterlibatan Dosen Industri	<p>Keterlibatan dosen industri/praktisi. Tabel 2 DAPS</p> <p>M_{KKI} = Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi. M_{KK} = Jumlah mata kuliah kompetensi</p> <p>Dosen industri/praktisi adalah karyawan dan/atau pemilik usaha yang memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang program studi, dinilai dari portofolio dan latar belakang pendidikan.</p> <p>Dosen Industri, memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sesuai dengan bidang yang ditekuni, dan/atau pernah memimpin sebuah tim di tempat kerjanya.</p> <p>Keterlibatan dosen industri/praktisi bisa dalam bentuk anggota dari <i>team teaching</i>.</p>	Jika $PMKI \geq 30\%$, maka Skor = 4	Jika $PMKI < 20\%$, maka Skor = 2 + (10 x PMKI)	Tidak ada skor kurang dari 2.	
			$PMKI = (M_{KKI} / M_{KK}) \times 100\%$ $Skor = (M_{KKI} / M_{KK}) \times 100\%$			
17	Dosen Tidak Tetap (DTT)	<p>DTT</p> <p>NDTT = Jumlah DTT yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS yang diakreditasi. Tabel 3 DAPS</p>	Jika $PDTT \leq 10\%$, maka Skor = 4	Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka Skor = (14 - (20 x PDTT)) / 3	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika $PDTT > 40\%$, maka Skor = 0
		Skor = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100%				

18	Tenaga Kependidikan	<p>A. Kualifikasi dan kecukupan Tendik berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Catatan: Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah Tendik, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektivitas pekerjaan dan kebutuhan akan Tendik.</p>	UPPS memiliki Tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan PS.	UPPS memiliki Tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan PS dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.	UPPS memiliki Tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan PS dan mendukung pelaksanaan akademik.	UPPS memiliki Tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan PS dan mendukung pelaksanaan akademik.	UPPS memiliki Tendik yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan PS.
		<p>B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan PS.</p>	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan PS, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan PS, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan PS dan kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan PS.	UPPS tidak memiliki laboran.
		$Skor = (A + B) / 2$					
19	Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian CP.	UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana.

20	Laboratorium di Luar Kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan wilayah /unit usaha untuk praktik lapangan di luar kampus	UPPS menggunakan wilayah /unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta memiliki perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait	UPPS menggunakan wilayah /unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik namun belum memiliki perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait	UPPS menggunakan wilayah /unit usaha untuk melakukan praktik lapangan dengan akses pemanfaatan yang baik namun tidak terencana dan belum memiliki perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait	UPPS menggunakan wilayah /unit usaha untuk melakukan praktik lapangan namun tidak terencana, dengan akses pemanfaatan yang terbatas, dan belum memiliki perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait	UPPS tidak melaksanakan praktik lapangan di wilayah/unit usaha (destinasi)
21	Laboratorium di dalam kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium di dalam kampus.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang mutakhir serta aksesibilitas yang tinggi untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan sangat terawat.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium bukan milik sendiri.	UPPS tidak memiliki laboratorium.	Tidak ada skor 0
PROSES							

22	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa
		B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS.	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.
		C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada	Tidak ada skor antara 2 dan 4.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada	Tidak ada skor kurang dari 2.	

		<p>daya saing bangsa.</p> <p>2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>proses pembelajaran terkait penelitian.</p>		<p>proses pembelajaran terkait penelitian.</p>	
		<p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	<p>Tidak ada Skor antara 2 dan 4.</p>	<p>Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	<p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p>
		<p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: <i>Research Based Education (RBE), Industry Based Education (IBE), teaching factory/teaching industry</i>, dll.</p>	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan CP yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p>	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan CP yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah.</p>	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan CP yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah.</p>	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan CP yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.</p> <p>Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan CP yang direncanakan.</p>

23	Monev Proses Pembelajaran	Monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh CPL.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih.	UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
24	Pembelajaran Praktik	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, dan atau praktik lapangan. Tabel 4 DAPS JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, dan atau praktik lapangan, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	Jika PJP ≥ 30% , maka Skor = 4	Jika PJP < 30% , maka Skor = (40 x PJP) / 3			
$PJP = (JP / JB) \times 100\%$							
25	Penilaian Pembelajaran	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian CP berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah mata	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.

		5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	kuliah.	kuliah.			
		<p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. 	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CP minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CP minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah mata kuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CP yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah mata kuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CP yang dinilai < 25% dari jumlah mata kuliah.	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CP.
		<p>C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

		6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.					
		$Skor = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$					
26	Uji Kompetensi dan Sertifikasi Mahasiswa	A. Pelaksanaan uji kompetensi mengacu kepada standar nasional dan internasional yang relevan dengan menggunakan salah satu atau lebih dari skema uji kompetensi.	Dilakukan uji kompetensi terhadap mahasiswa dengan mengacu kepada SKKNI atau standar lainnya yang relevan dengan menggunakan salah satu atau lebih dari skema uji kompetensi, dilaksanakan secara terencana, dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang relevan.	Dilakukan uji kompetensi terhadap mahasiswa dengan mengacu kepada SKKNI atau standar lainnya yang relevan dengan menggunakan salah satu atau lebih dari skema uji kompetensi, dilaksanakan secara tidak terencana, dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang relevan	Dilakukan uji kompetensi secara mandiri dan tidak dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang relevan.	Tidak ada nilai 0 dan 1	
		B. Sertifikasi mahasiswa bidang pariwisata dan atau hospitaliti.	Hampir semua mahasiswa tingkat akhir (sem 7 dan 8) lebih dari 70% memiliki sertifikasi kompetensi relevan dari lembaga akreditasi nasional atau internasional yang bereputasi tinggi.	Mayoritas mahasiswa tingkat akhir, sem 7 dan 8 (50% – 70%) memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dari lembaga nasional/internasional yang diakui.	Sebagian mahasiswa tingkat akhir, sem 7 dan 8 ($25\% \leq x < 50\%$) memiliki sertifikasi kompetensi dari lembaga yang diakui, tetapi belum mencakup kompetensi utama program studi.	Sebagian kecil (kurang dari 25%) mahasiswa tingkat akhir (sem 7 dan 8) memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan, namun belum tersertifikasi oleh lembaga yang diakui.	Tidak ada mahasiswa tingkat akhir (sem 7 dan 8) yang memiliki sertifikasi kompetensi terkait bidang PS
		$Skor = (A + B)/2$					

27	Penugasan DTPS sebagai pembimbing Tugas Akhir (TA)	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. $R_{DTPSSPU}$ = Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing pada PS yang diakreditasi R_{DTPSUL} = Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing pada PS lain di PT $RDPU$ = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester Tabel 5 DAPS	Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4	Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = $7 - (RDPU / 2)$	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika $RDPU > 10$, maka Skor = 0	
		$Skor\ RDPU = (R_{DTPSSPU} + R_{DTPSUL}) / 2$					
28	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS	EWMP DTPS. Tabel 6 DAPS	Jika $12 \leq EWMP \leq 16$, maka Skor = 4	Jika $6 \leq EWMP < 12$, maka Skor = $((2 \times EWMP) - 12) / 3$ Jika $16 < EWMP \leq 18$, maka Skor = $36 - (2 \times EWMP)$		Jika $EWMP < 6$ atau $EWMP > 18$, maka Skor = 0	
29	Pengembangan DTPS	Upaya pengembangan DTPS Catatan: Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di PT yang tertuang dalam Renstra PT secara konsisten.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di PT yang tertuang dalam Renstra PT.	Pengembangan DTPS dilakukan tanpa mengikuti rancangan pengembangan di tingkat institusi	Pengembangan DTPS dilakukan tanpa perencanaan	Perguruan tinggi dan atau UPPS tidak memiliki rencana dan tidak melaksanakan pengembangan SDM.
LUARAN							
30	Analisis Pemenuhan CPL	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan standar yang dibuat oleh pemerintah dan Hildiktipari (KKNI), standar industri (SKKNI) dan standar industri (Internasional/Regional) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan,	Analisis CPL memenuhi 3 aspek.	Analisis CPL memenuhi 2 aspek.	Analisis CPL memenuhi 1 aspek.	Analisis CPL tidak memenuhi ketiga aspek.	Tidak dilakukan analisis CPL.

		2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.				
31	Prestasi Akademik Mahasiswa	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang PS. Tabel 7.a. DAPS NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2	
				Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$	
$RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$						
32	Prestasi Nonakademik Mahasiswa	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7.b. DAPS NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2	
				Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$	
$RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$						

33	IPK Lulusan	IPK lulusan. Tabel 8 DAPS RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Jika RIPK $\geq 3,25$, maka Skor = 4	Jika $2,00 \leq \text{RIPK} < 3,25$, maka Skor = $((8 \times \text{RIPK}) - 6) / 5$	Tidak ada skor kurang dari 2		
34	Masa Studi	Masa studi. Tabel 9 DAPS MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	Jika $3,5 < \text{MS} \leq 4,5$, maka Skor = 4	Jika $3 < \text{MS} \leq 3,5$, maka Skor = $(8 \times \text{MS}) - 24$	Jika $\text{MS} \leq 3$, maka Skor = 0		
				Jika $4,5 < \text{MS} \leq 7$, maka Skor = $(56 - (8 \times \text{MS})) / 5$			
35	Kelulusan Tepat Waktu	Kelulusan tepat waktu. Tabel 9 DAPS PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	Jika $\text{PTW} \geq 70\%$, maka Skor = 4	Jika $\text{PTW} < 70\%$, maka Skor = $1 + ((30 \times \text{PTW}) / 7)$	Tidak ada Skor kurang dari 1.		
36	Keberhasilan Studi	Keberhasilan studi. Tabel 9 DAPS PPS = Persentase keberhasilan studi.	Jika $\text{PPS} \geq 85\%$, maka Skor = 4	Jika $30\% \leq \text{PPS} < 85\%$, maka Skor = $((80 \times \text{PPSi}) - 24) / 11$	Jika $\text{PPS} < 30\%$, maka Skor = 0		
DAMPAK							
37	Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek.	UPPS tidak melaksanakan tracer study.
38	Waktu Tunggu Lulusan	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 10.a. DAPS	Jika $\text{WT} < 3$ bulan, maka Skor = 4	Jika $3 \leq \text{WT} \leq 6$, maka Skor = $(24 - (4 \times \text{WT})) / 3$.		Jika $\text{WT} > 6$ bulan, maka Skor = 0	
			Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $\text{Prmin} = 30\%$. - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $\text{Prmin} = 50\% - ((\text{NL} / 300) \times$				

			<p>20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan di atas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan di atas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum</p>		
39	Kesesuaian Bidang Kerja	<p>PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 10.b. DAPS</p>	<p>Jika $PBS \geq 60\%$, maka Skor = 4</p>	<p>Jika $PBS < 60\%$, maka Skor = $(20 \times PBS) / 3$</p>	
			<p>Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan di atas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan di atas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum</p>		
40	Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan	<p>Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 10.c. DAPS</p>	<p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4</p>	<p>Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$</p>	<p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2</p>
				<p>Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$</p>	<p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$</p>
			<p>$RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: a = 5%, b = 20%, c = 90%. NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional. NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NL = Jumlah lulusan.</p>		
			<p>Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan di atas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan di atas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang bekerja/berwirausaha</p>		

			No Elemen Indikator 4 3 2 1 0 PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum				
			RI = $(NI / NL) \times 100\%$, RN = $(NN / NL) \times 100\%$, RW = $(NW / NL) \times 100\%$ Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% .				
41	Tingkat Kepuasan Pengguna	A. Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 11 DAPS	<p style="text-align: center;">Skor = STKi / 7</p> <p>Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TK1 = Etika; TK2 = keahlian pada bidang ilmu/kompetensi utama; TK3 = kemampuan berbahasa asing; TK4 = penggunaan teknologi informasi; TK5 = kemampuan berkomunikasi; TK6 = kerjasama tim; TK7 = pengembangan diri Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ i = 1, 2, ..., 7 a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase "baik". c_i = persentase "cukup". d_i = persentase "kurang".</p> <p>Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk PS dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan di atas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan di atas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas <i>tracer study</i> dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum</p>				
		B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan pengguna.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran, penelitian dan PkM.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidental.	Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.
			Skor = $(2xA + B) / 3$				
B.2. RELEVANSI PENELITIAN							

MASUKAN							
42	Peta Jalan dan Pedoman Penelitian	<p>A. UPPS memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya, yang mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja. 	<p>UPPS memiliki dokumen formal Renstra Penelitian yang lengkap, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya yang memadai (termasuk pendanaan dan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)), serta sasaran program strategis dengan indikator kinerja yang terukur dan relevan.</p>	<p>UPPS memiliki dokumen Renstra Penelitian yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, dan sumber daya yang memadai (termasuk pendanaan dan penerapan sistem berbasis TIK), tetapi indikator kinerja belum sepenuhnya terukur.</p>	<p>UPPS memiliki dokumen Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan dan peta jalan penelitian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi, tetapi aspek sumber daya atau sasaran program strategis belum dijabarkan secara rinci.</p>	<p>UPPS memiliki dokumen Renstra Penelitian yang sangat umum dan tidak jelas mencerminkan diferensiasi misi perguruan tinggi, dengan peta jalan penelitian yang tidak spesifik dan sumber daya yang belum teridentifikasi.</p>	<p>UPPS tidak memiliki dokumen formal Renstra Penelitian yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, atau sasaran program strategis dan indikator kinerja.</p>
		<p>B. Analisis terkait aspek 1 dan 2 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.</p>	<p>Renstra mencakup landasan pengembangan yang sangat jelas, relevan, dan komprehensif untuk mendukung diferensiasi misi, sementara peta jalan mencakup analisis mendalam terhadap akar masalah, faktor pendukung, dan penghambat ketercapaian dengan</p>	<p>Renstra mencakup landasan pengembangan yang jelas dan mendukung diferensiasi misi, sementara peta jalan mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung, dan penghambat ketercapaian secara lengkap namun belum dilaksanakan secara sistematis.</p>	<p>Renstra mencakup landasan pengembangan yang relevan dengan diferensiasi misi, namun tidak terperinci, dan peta jalan mencakup sebagian besar elemen (akar masalah, faktor pendukung, penghambat) dengan analisis yang dangkal.</p>	<p>Renstra tersedia tetapi tidak memuat landasan pengembangan yang relevan dengan diferensiasi misi, dan peta jalan penelitian tidak mencakup analisis akar masalah, faktor pendukung, atau penghambat ketercapaian</p>	<p>Tidak ada Renstra atau peta jalan penelitian, serta tidak terdapat analisis terkait landasan pengembangan, diferensiasi misi, akar masalah, faktor pendukung, atau penghambat ketercapaian.</p>

			implementasi yang konsisten dan berdampak nyata.			secara terstruktur.	
		Skor = (A + B) / 2					
PROSES							
43	Proses Penelitian	<p>A. UPPS menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tata cara penilaian dan reviu, 2) legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. 	<p>UPPS memiliki mekanisme formal yang terintegrasi dan lengkap, mencakup tata cara penilaian dan reviu, legalitas <i>reviewer</i>, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti atau kerja sama, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.</p>	<p>UPPS memiliki mekanisme formal yang lengkap, mencakup tata cara penilaian, legalitas <i>reviewer</i>, hasil penilaian, dan legalitas penugasan peneliti, tetapi hasil monitoring dan dokumentasi luaran penelitian belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik.</p>	<p>UPPS memiliki mekanisme formal yang mencakup sebagian besar aspek, seperti tata cara penilaian dan reviu, legalitas <i>reviewer</i>, serta hasil penilaian usul penelitian, tetapi belum ada monitoring dan dokumentasi luaran yang terstruktur.</p>	<p>UPPS memiliki mekanisme tata cara penilaian dan reviu, tetapi tidak lengkap dan belum mencakup legalitas <i>reviewer</i>, hasil penilaian, penugasan peneliti, monitoring, atau dokumentasi luaran penelitian.</p>	<p>UPPS tidak memiliki mekanisme atau dokumen formal terkait tata cara penilaian dan reviu, legalitas <i>reviewer</i>, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, monitoring, atau dokumentasi luaran penelitian.</p>
		<p>B. UPPS menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.</p>	<p>UPPS menunjukkan budaya penelitian yang kuat melalui program pengembangan penelitian yang terencana, terukur, dan berdampak luas, dengan seluruh pelaksanaan penelitian selaras dengan peta jalan dan mendukung diferensiasi misi PT.</p>	<p>UPPS memiliki program pengembangan peneliti yang aktif dan terarah, dengan pelaksanaan penelitian yang sesuai peta jalan dan mendukung pencapaian sasaran strategisnya.</p>	<p>UPPS memiliki program pengembangan penelitian yang mulai berjalan, dengan sebagian besar penelitian sesuai peta jalan, tetapi belum terintegrasi secara strategis.</p>	<p>UPPS memiliki program pengembangan peneliti yang terbatas, tetapi pelaksanaan penelitian hanya sebagian kecil yang relevan dengan peta jalan.</p>	<p>UPPS tidak memiliki program pengembangan peneliti, serta pelaksanaan penelitian tidak sesuai atau tidak terkait dengan peta jalan yang ada.</p>

		$Skor = (A + B) / 2$					
44	Penelitian DTPS	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 12 DAPS NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2		
				Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$		
			$RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$				
45	Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 13 DAPS	Jika $PPDM \geq 25\%$, maka Skor = 4	Jika $PPDM < 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
			NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir. $PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$				
LUARAN							
46	Analisis Terhadap Luaran Penelitian sesuai Pilihan Diferensiasi Misi	A. UPPS menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	UPPS menunjukkan analisis komprehensif terhadap seluruh luaran penelitian, penelitian yang berkelanjutan dan sepenuhnya sesuai peta jalan, kerja sama strategis dan berkelanjutan, serta realisasi sumber dana penelitian yang mencapai atau	UPPS menunjukkan analisis lengkap terhadap luaran penelitian, penelitian berjalan berkelanjutan sesuai peta jalan, kerja sama aktif dilaksanakan, dengan realisasi sumber dana penelitian yang mendekati target.	UPPS memiliki analisis yang mencakup sebagian besar luaran penelitian, penelitian sebagian besar berkelanjutan sesuai peta jalan, beberapa kerja sama terlaksana, tetapi realisasi sumber dana penelitian masih di bawah target.	UPPS menunjukkan analisis yang sangat terbatas terhadap luaran penelitian, penelitian tidak konsisten dengan peta jalan, kerja sama minim, dan realisasi sumber dana penelitian rendah.	UPPS tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian, tidak ada bukti keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama penelitian, atau realisasi sumber dana penelitian.

			melampaui target.				
	B.	UPPS menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: 1) publikasi, 2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan 3) produk/jasa.	UPPS menunjukkan analisis komprehensif terhadap ketercapaian luaran penelitian, dengan publikasi yang melampaui target, HKI yang terdaftar secara optimal, serta produk/jasa yang inovatif dan memberikan dampak nyata sesuai diferensiasi misi PT.	UPPS menunjukkan analisis lengkap terhadap ketercapaian luaran penelitian, dengan publikasi yang sesuai target, HKI yang sudah terdaftar, dan produk/jasa yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan diferensiasi misi PT..	UPPS menunjukkan analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian yang mencakup sebagian target indikator kinerja, dengan publikasi yang mulai berkembang, HKI yang sebagian sudah terdaftar, dan beberapa produk/jasa yang dihasilkan.	UPPS memiliki analisis yang sangat terbatas terhadap ketercapaian luaran penelitian, dengan sedikit publikasi, HKI yang belum terdaftar, atau produk/jasa yang belum terimplementasi.	UPPS tidak memiliki hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian, tidak ada bukti pencapaian publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau produk/jasa yang relevan.
	C.	Luaran penelitian dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi, 2) Jurnal nasional terakreditasi, 3) Jurnal internasional, 4) Jurnal internasional bereputasi, 5) Seminar wilayah/lokal/PT 6) Seminar nasional, 7) Seminar internasional, 8) Tulisan di media massa nasional, 9) Tulisan di media massa internasional.	Luaran penelitian mencakup jurnal internasional bereputasi, seminar internasional berkualitas, dan/atau tulisan di media massa internasional terkemuka, menunjukkan capaian luar biasa pada level nasional maupun internasional.	Luaran penelitian mencakup jurnal internasional, seminar internasional, dan/atau tulisan di media massa internasional, dengan kontribusi yang konsisten pada level nasional dan internasional.	Luaran penelitian mencakup jurnal nasional terakreditasi, seminar nasional, atau tulisan di media massa nasional, tetapi kontribusi internasional masih sangat minim.	Luaran penelitian terbatas pada jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT, tanpa kontribusi pada level nasional maupun internasional.	Tidak ada luaran penelitian dalam bentuk jurnal, seminar, atau tulisan di media massa, baik nasional maupun internasional.
Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5							

47	Luaran Penelitian DTPS secara Mandiri maupun dengan Mahasiswa	Publikasi ilmiah DTPS yang dihasilkan secara mandiri atau bersama mahasiswa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 14 DAPS	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2	
			<p>NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.</p>			Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$
$RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$, $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$, $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$ Faktor: $a = 0,2$, $b = 2$, $c = 4$						
DAMPAK						
48	Produk/Jasa Karya yang Diadopsi oleh Industri/ Masyarakat	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Tabel 15.b. DAPS	Jika $NAPJ \geq 2$, maka Skor = 4 .	Jika $NAPJ = 1$, maka Skor = 3 .	Jika $NAPJ = 0$, maka Skor = 2 .	Tidak ada Skor kurang dari 2.
			$NAPJ =$ Jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.			
49	Artikel Ilmiah	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 16 DAPS N_{AS} = jumlah artikel yang disitasi.	Jika $RS \geq 0,5$, maka Skor = 4 .	Jika $RS < 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times RS)$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

Skor = NAS / NDTPS

B.3. RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MASUKAN

50	Peta Jalan dan Pedoman PkM	A. UPPS memiliki dokumen formal Renstra dan menetapkan peta jalan PkM di tingkat PT sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	UPPS memiliki dokumen formal Renstra dan peta jalan PkM yang lengkap dan terintegrasi, sepenuhnya mencerminkan diferensiasi misinya, dan telah dilaksanakan secara konsisten dengan dampak signifikan pada masyarakat.	UPPS memiliki dokumen formal Renstra dan peta jalan PkM yang mencakup semua aspek diferensiasi misinya, dengan pelaksanaan yang sesuai tetapi belum sepenuhnya konsisten.	UPPS memiliki dokumen formal Renstra PkM yang mencakup sebagian besar aspek diferensiasi misinya, dengan peta jalan yang mulai disusun tetapi belum diimplementasikan secara menyeluruh.	UPPS memiliki dokumen Renstra PkM yang sangat umum tanpa peta jalan yang jelas, dan hanya mencakup sebagian kecil diferensiasi misinya.	UPPS tidak memiliki dokumen formal Renstra atau peta jalan PkM, dan tidak menunjukkan upaya untuk menelaraskan kegiatan PkM dengan diferensiasi misinya.
		B. PT memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat PT sesuai dengan diferensiasi misinya.	PT memiliki pedoman yang jelas, lengkap, dan terintegrasi dalam PkM dan pengembangan kualitas kepakaran, sepenuhnya mendukung rencana pengembangan kepakaran yang sesuai dengan diferensiasi misinya, serta diterapkan secara konsisten dengan hasil yang terukur.	PT memiliki pedoman yang cukup komprehensif dalam PkM dan pengembangan kepakaran, yang sudah disesuaikan dengan rencana pengembangan kepakaran, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal.	PT memiliki pedoman yang mencakup sebagian besar aspek PkM dan pengembangan kepakaran, tetapi belum sepenuhnya konsisten dengan rencana pengembangan kepakaran sesuai diferensiasi misinya.	PT memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran yang sangat umum dan terbatas cakupannya, dengan sedikit keterkaitan dengan diferensiasi misi perguruan tinggi.	PT tidak memiliki pedoman terkait PkM atau pengembangan kualitas kepakaran, dan tidak menunjukkan upaya untuk menelaraskan dengan rencana pengembangan kepakaran sesuai diferensiasi misinya.
							Skor = (A + B)/2

51	Proses PkM	<p>A. UPPS menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas mencakup 6 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tata cara penilaian dan reuiu, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerja sama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM. 	<p>UPPS memiliki mekanisme yang sangat terstruktur dan berintegritas tinggi, mencakup tata cara penilaian, legalitas reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan, monitoring, dan dokumentasi luaran, dengan implementasi yang konsisten dan menghasilkan dampak nyata.</p>	<p>UPPS memiliki mekanisme yang lengkap mencakup tata cara penilaian, legalitas reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan, monitoring, dan dokumentasi luaran, tetapi implementasi monitoring dan evaluasinya belum sepenuhnya sistematis.</p>	<p>UPPS memiliki mekanisme yang mencakup sebagian besar aspek, seperti tata cara penilaian, legalitas reviewer, dan hasil penilaian usul PkM</p>	<p>UPPS memiliki mekanisme terbatas dengan tata cara penilaian dan legalitas reviewer yang belum terdokumentasi dengan baik, serta tidak mencakup hasil penilaian, legalitas penugasan, atau dokumentasi luaran PkM.</p>	<p>UPPS tidak memiliki mekanisme untuk menyelenggarakan PkM yang berintegritas, termasuk tidak ada tata cara penilaian, legalitas reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan, monitoring, atau dokumentasi luaran.</p>
		<p>B. UPPS menunjukkan budaya PkM, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.</p>	<p>UPPS menunjukkan budaya PkM yang sangat kuat, dengan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), pelaksanaan PkM sepenuhnya sesuai peta jalan, serta evaluasi dan pengembangan dosen pelaksana PkM yang terstruktur, menyeluruh, dan memberikan dampak signifikan.</p>	<p>UPPS menunjukkan budaya PkM yang baik, dengan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), pelaksanaan PkM yang sesuai peta jalan, serta evaluasi dan pengembangan dosen yang terencana tetapi belum menyeluruh.</p>	<p>UPPS menunjukkan budaya PkM yang berkembang, dengan layanan kepakaran yang mulai terstandarisasi (sertifikasi/lisensi), pelaksanaan PkM yang sebagian besar sesuai peta jalan, tetapi evaluasi dan pengembangan dosen belum optimal.</p>	<p>UPPS menunjukkan budaya PkM yang terbatas, dengan layanan kepakaran yang belum akuntabel dan profesional, pelaksanaan PkM yang sebagian kecil sesuai peta jalan, serta evaluasi dan pengembangan dosen yang minim.</p>	<p>UPPS tidak menunjukkan budaya PkM, tidak memiliki layanan kepakaran yang akuntabel atau profesional, tidak ada kesesuaian dengan peta jalan, serta tidak melaksanakan evaluasi pelaksanaan atau pengembangan dosen pelaksana PkM.</p>
		Skor = (A + B)/2					
52	Kegiatan PkM DTSP	<p>Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 17 DAPS</p>	<p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4</p>	<p>Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$</p>	<p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2</p>		
				<p>Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times$</p>	<p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$</p>		

			RN)/(a x b))				
			$RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$		Faktor: a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1 NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS yang diakreditasi.		
53	PkM Dosen dan Mahasiswa	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 18 DAPS	Jika $P_{PkMDM} \geq 25\%$, maka Skor = 4	Jika $P_{PkMDM} < 25\%$, maka Skor = 2 + (8 x PPDM)	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
			NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. $P_{PkMDM} = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$				
LUARAN							
54	Analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi	A. PT/UPPS menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerja sama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PT/UPPS menunjukkan hasil analisis komprehensif terhadap ketercapaian luaran PkM, dengan adopsi lisensi terbuka secara optimal, pengembangan kapasitas SDM yang signifikan, layanan terlembaga yang mapan, kerja sama yang berkelanjutan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan yang mencapai atau melampaui target.	PT/UPPS menunjukkan hasil analisis yang lengkap terhadap ketercapaian luaran PkM, dengan adopsi lisensi terbuka pada sebagian besar kegiatan, pengembangan kapasitas SDM yang cukup baik, layanan terlembaga yang berjalan konsisten, kerja sama strategis, serta realisasi sumber dana mendekati target.	PT/UPPS menunjukkan hasil analisis ketercapaian luaran PkM yang mencakup sebagian aspek, seperti adopsi lisensi terbuka yang mulai diterapkan, pengembangan kapasitas SDM yang bertahap, sebagian layanan terlembaga terlaksana, beberapa kerja sama berjalan, tetapi realisasi sumber dana masih di bawah target.	PT/UPPS menunjukkan hasil analisis yang sangat terbatas, dengan sedikit adopsi lisensi terbuka, pengembangan kapasitas SDM yang minim, layanan terlembaga yang belum optimal, kerja sama yang sporadis, dan realisasi sumber dana yang rendah.	PT/UPPS tidak memiliki hasil analisis ketercapaian luaran PkM, tidak ada adopsi lisensi terbuka, tidak menunjukkan pengembangan kapasitas SDM, layanan terlembaga, kerja sama, atau realisasi sumber dana pengabdian.

		B. PT/UPPS menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PT/UPPS menunjukkan hasil analisis yang komprehensif terhadap luaran PkM, dengan rekognisi bidang keilmuan yang relevan dan signifikan, sepenuhnya mendukung diferensiasi misi PT, dan memberikan dampak nyata di tingkat nasional atau internasional.	PT/UPPS menunjukkan hasil analisis yang cukup lengkap terhadap luaran PkM, dengan rekognisi bidang keilmuan yang sesuai dan mendukung diferensiasi misi PT, tetapi dampaknya belum maksimal.	PT/UPPS memiliki hasil analisis terhadap luaran PkM yang mencakup sebagian aspek, dengan rekognisi bidang keilmuan yang mulai berkembang, tetapi belum menunjukkan relevansi yang kuat dengan diferensiasi misi PT.	PT/UPPS memiliki hasil analisis yang sangat terbatas terhadap luaran PkM, dengan rekognisi yang minim atau tidak relevan dengan diferensiasi misi PT.	PT/UPPS tidak memiliki hasil analisis terhadap luaran PkM, dan tidak ada rekognisi bidang keilmuan yang mencerminkan diferensiasi misi PT.
			Skor = (A + B) / 2				
55	Luaran PkM DTSP secara mandiri maupun dengan Mahasiswa	Luaran dari kegiatan PkM DTSP yang dihasilkan secara mandiri atau bersama mahasiswa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 19 DAPS	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2		
				Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$		
			$RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: a = 1%, b = 10%, c = 50% NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NM = Jumlah DTSP pada saat TS.				
DAMPAK							

56	UPPS/PS mendapatkan Pengakuan Kepakaran Profesional (Individu dan Lembaga) dari Masyarakat, Pemerintah dan Industri.	A. UPPS/PS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	UPPS/PS memiliki pengakuan kepakaran profesional yang luar biasa, mencakup individu dan lembaga, dengan pengakuan yang kuat dan berkelanjutan dari masyarakat, pemerintah, dan industri, memberikan dampak nyata di tingkat nasional atau internasional.	UPPS/PS memiliki pengakuan kepakaran profesional yang baik, mencakup individu dan lembaga, dengan pengakuan luas dari masyarakat, pemerintah, dan industri, tetapi belum sepenuhnya berkesinambungan atau memberikan dampak signifikan.	UPPS/PS memiliki pengakuan kepakaran profesional yang mencakup individu dan lembaga, dengan pengakuan yang berkembang dari sebagian kecil pihak masyarakat, pemerintah, atau industri.	UPPS/PS memiliki pengakuan kepakaran profesional yang sangat terbatas, hanya mencakup individu tertentu, dan belum diakui oleh masyarakat, pemerintah, atau industri secara luas.	UPPS/PS tidak memiliki pengakuan kepakaran profesional, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, atau industri.
		B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, d) Desain Tata Letak, dll	UPPS/PS memiliki karya yang terekognisi secara luas, mencakup berbagai kategori HKI, dengan penerapan nyata yang memberikan dampak signifikan pada masyarakat, industri, atau sektor lainnya.	UPPS/PS memiliki karya yang mencakup kategori HKI yang telah diterapkan secara nyata di masyarakat.	UPPS/PS memiliki karya yang mencakup beberapa kategori HKI, tetapi tingkat penerapannya di masyarakat masih rendah.	UPPS/PS memiliki karya yang terekognisi sangat terbatas.	Tidak ada karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi atau diterapkan masyarakat, baik berupa HKI maupun aplikasi nyata.
Skor = (A + B)/2							

C. AKUNTABILITAS							
MASUKAN							
57	Tata Pamong dan Tata Kelola : UPPS Memiliki Statuta dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.	Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada PT memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum;	PT memiliki dokumen tata kelola yang sangat lengkap, mencakup seluruh elemen statuta dan struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, terdefinisi, dan	PT memiliki dokumen tata kelola yang lengkap mencakup seluruh elemen statuta (ketentuan umum hingga ketentuan penutup) dan struktur organisasi dengan	PT memiliki dokumen tata kelola yang mencakup sebagian besar elemen statuta (misalnya, ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan Tridharma) dan struktur organisasi	PT memiliki dokumen tata kelola yang sangat terbatas, dengan statuta yang tidak mencakup sebagian besar elemen penting, dan struktur	PT tidak memiliki dokumen formal tata kelola yang mencakup statuta maupun struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.

		<p>b. identitas;</p> <p>c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;</p> <p>d. sistem pengelolaan;</p> <p>e. sistem penjaminan mutu internal;</p> <p>f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;</p> <p>g. pendanaan dan kekayaan;</p> <p>h. ketentuan peralihan; dan</p> <p>i. ketentuan penutup.</p> <p>2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya:</p> <p>a. penyusun kebijakan;</p> <p>b. pelaksana akademik;</p> <p>c. pengawas dan penjaminan mutu;</p> <p>d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan</p> <p>e. pelaksana administrasi atau tata usaha, organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.</p>	diterapkan secara konsisten, mendukung tata kelola yang efektif dan efisien.	seluruh unsur penting (penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas mutu, penunjang akademik, pelaksana administrasi), tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal.	dengan beberapa unsur penting (penyusun kebijakan, pelaksana akademik, penunjang akademik), tetapi rincian tugas pokok dan fungsinya belum sepenuhnya terdefinisi.	organisasi yang belum lengkap serta tidak jelas tugas pokok dan fungsinya.	
58	Kerja sama	<p>A. Kerja sama PT di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir. Tabel 20 DAPS</p>	<p>Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$.</p>	<p>Jika $RK < 4$, maka $A = RK$.</p>	<p>$RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$ Faktor: $a = 2, b = 4, c = 0$</p> <p>$N1 = \text{Jumlah kerja sama pendidikan.}$</p> <p>$N2 = \text{Jumlah kerja sama penelitian. } N3 = \text{Jumlah kerja sama PkM.}$</p> <p>$\text{NDTPS} = \text{Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.}$</p>		
		<p>B. Kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 20 DAPS</p>	<p>Jika $NI \geq a$, maka $B = 4$</p>	<p>Jika $NI < a$ dan $NN \geq b$, maka $B = 3 + (NI / a)$</p>	<p>Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NL \geq c$, maka $B = 2$</p>	<p>Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NL < c$, maka $B = (2 \times NL) / c$</p>	
			<p>$NI = \text{Jumlah kerja sama tingkat internasional.}$</p> <p>$\text{tingkat nasional.}$</p> <p>$NW = \text{Jumlah kerja sama tingkat wilayah/lokal.}$</p>		<p>Faktor: $a = 3, b = 9, c = 12$ $NN = \text{Jumlah kerja sama}$</p>		

		Skor = (2 x A) + B /3					
PROSES							
59	PT/UPPS Memiliki Sistem Tata Pamong sesuai Konteks Institusi untuk Menjamin Akuntabilitas, Keberlanjutan dan Transparansi, serta Mitigasi Potensi Risiko.	<p>Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya.</p> <p>Catatan :</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi PT.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; di antaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan PT, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan;</p>	<p>PT/UPPS memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang sangat terstruktur, mencakup seluruh aspek (pemantauan pendidikan, mitigasi risiko, kepatuhan, dan pengelolaan pengaduan), dengan implementasi yang konsisten, transparan, dan memberikan dampak positif yang terukur.</p>	<p>PT/UPPS memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lengkap, mencakup pemantauan dan evaluasi pendidikan, mitigasi potensi risiko, kepatuhan terhadap otoritas dan etika akademik, serta pengelolaan keluhan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal.</p>	<p>PT/UPPS memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang mencakup sebagian besar aspek, seperti pemantauan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan potensi risiko, tetapi sistem belum efektif dalam penjaminan kepatuhan dan pengelolaan pengaduan.</p>	<p>PT/UPPS memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang sangat terbatas, tanpa cakupan aspek-penting seperti pemantauan risiko, kepatuhan terhadap otoritas akademik, atau pengelolaan keluhan.</p>	<p>PT/UPPS tidak memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan akademik dan non-akademik, termasuk pemantauan risiko dan penyelesaian keluhan atau pengaduan.</p>

60	PT/UPPS Memiliki Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis TIK.	<p>Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan.</p> <p>Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketepatan data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; melaporkan data profil dan kinerja PT pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan data dan informasi PT yang dapat diakses publik, dan menjamin keteraksesan publik. 	<p>PT/UPPS memiliki kebijakan pengelolaan data yang sangat terstruktur dan terintegrasi, menjamin keamanan, akurasi, kelengkapan, ketepatan, dan keteraksesan data, mendukung pengambilan keputusan strategis, pelaporan ke PD Dikti, serta keterbukaan akses informasi kepada publik sesuai peraturan.</p>	<p>PT/UPPS memiliki kebijakan pengelolaan data yang lengkap dan terintegrasi, mencakup keamanan, akurasi, kelengkapan, dan ketepatan data, serta sistem yang mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan ke PD Dikti, tetapi keteraksesan publik belum optimal.</p>	<p>PT/UPPS memiliki kebijakan pengelolaan data yang mencakup sebagian besar aspek, seperti keamanan dan akurasi data, tetapi sistem belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan strategis atau keteraksesan data oleh publik.</p>	<p>PT/UPPS memiliki kebijakan pengelolaan data yang sangat terbatas, dengan sistem yang belum mampu menjamin keamanan, akurasi, kelengkapan, atau keteraksesan data oleh pihak internal dan publik.</p>	<p>PT/UPPS tidak memiliki kebijakan atau sistem pengelolaan data dan informasi untuk akademik, kemahasiswaan, SDM, atau keuangan.</p>
61	Keberfungsian Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS/PT	<p>A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT yang mencakup 5 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>). 	<p>Sistem pengelolaan yang tersedia sangat terstruktur dan terintegrasi, mencakup kelima aspek secara penuh (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>), dengan bukti formal yang jelas dan implementasi yang konsisten serta berdampak positif pada operasional PT/UPPS.</p>	<p>Sistem pengelolaan mencakup kelima aspek (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) dengan bukti formal yang cukup lengkap, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik operasional.</p>	<p>Sistem pengelolaan mencakup sebagian besar aspek, tetapi implementasi penempatan personil dan pengawasan belum optimal atau terdokumentasi dengan baik.</p>	<p>Bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan sangat terbatas, hanya mencakup satu atau dua aspek tanpa integrasi yang memadai.</p>	<p>Tidak ada bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, atau pengawasan.</p>

		B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaannya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerja sama.	Dokumen formal dan pedoman pengelolaan tersedia secara sangat lengkap, mencakup seluruh 11 aspek dengan implementasi yang terintegrasi, konsisten, dan memberikan dampak positif yang terukur terhadap tata kelola perguruan tinggi.	Dokumen formal dan pedoman pengelolaan tersedia secara lengkap, mencakup seluruh 11 aspek dengan implementasi yang cukup baik, tetapi beberapa aspek seperti sistem penjaminan mutu atau kerja sama belum sepenuhnya terintegrasi.	Dokumen formal atau pedoman pengelolaan tersedia dan mencakup sebagian besar dari 11 aspek, tetapi implementasi pada beberapa aspek.	Dokumen formal atau pedoman pengelolaan tersedia secara terbatas, hanya mencakup sebagian kecil dari 11 aspek, dengan implementasi yang belum berjalan secara konsisten.	Tidak ada dokumen formal atau pedoman pengelolaan yang mencakup salah satu dari 11 aspek, dan tidak ada bukti keterlaksanaannya.
			Skor = (A + B)/2				
62	Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan asosiasi profesi bidang ilmu, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang PS, yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang PS, yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang PS, yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang PS, yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

63	PT Memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Kebijakan penerimaan mahasiswa baru sepenuhnya afirmatif, inklusif, dan adil, mencakup perhatian terhadap kelompok kurang mampu, penyandang disabilitas, serta tanpa diskriminasi suku, ras, agama, golongan, atau asal wilayah, dengan implementasi yang konsisten dan memberikan dampak signifikan pada keberagaman mahasiswa.	Kebijakan penerimaan mahasiswa baru mencakup aspek afirmatif, inklusif, dan adil, memperhatikan seluruh kelompok (ekonomi, suku, ras, agama, asal wilayah, dan disabilitas), dengan implementasi yang cukup baik tetapi belum sepenuhnya terintegrasi.	Kebijakan penerimaan mahasiswa baru mencakup aspek afirmatif untuk kelompok kurang mampu secara ekonomi dan mulai memperhatikan inklusivitas, tetapi implementasinya belum optimal.	Kebijakan penerimaan mahasiswa baru tersedia tetapi terbatas cakupannya, hanya memperhatikan sebagian kecil aspek afirmatif (misalnya, ekonomi), tanpa mencakup inklusivitas terhadap suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, atau disabilitas.	PT tidak memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif, atau adil, serta tidak ada perhatian terhadap kelompok kurang mampu atau penyandang disabilitas.
		B. PT/UPPS berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) - jika dimungkinkan; 2) Sharing sumber daya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah (salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), PS dan PT.	PT/UPPS memiliki upaya yang sangat terstruktur dan terintegrasi dalam memperluas akses, mencakup PJJ (pada tingkat program studi atau perguruan tinggi), sharing sumber daya pembelajaran, program beasiswa yang luas dan inklusif, serta kebijakan rekrutmen melalui RPL yang konsisten dengan Permendikbud No. 7/2020, memberikan dampak nyata pada	PT/UPPS memiliki upaya yang cukup komprehensif untuk memperluas akses, mencakup penyelenggaraan PJJ (minimal tingkat mata kuliah), sharing sumber daya pembelajaran, program beasiswa yang beragam, serta kebijakan rekrutmen melalui RPL, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi.	PT/UPPS memiliki beberapa upaya untuk memperluas akses, seperti penyelenggaraan beasiswa yang bervariasi (afirmasi, 3T, minat dan bakat) dan sharing sumber daya pembelajaran, tetapi implementasi PJJ atau RPL belum optimal.	PT/UPPS memiliki upaya terbatas untuk memperluas akses calon mahasiswa, misalnya dengan menyediakan salah satu bentuk beasiswa atau sharing sumber daya pembelajaran, tetapi belum ada PJJ atau kebijakan RPL.	PT/UPPS tidak memiliki upaya signifikan untuk memperluas akses calon mahasiswa, seperti PJJ, sharing sumber daya pembelajaran, program beasiswa, atau kebijakan RPL.

			peningkatan akses mahasiswa.					
		C. Daya Tarik PS. PT/UPPS melakukan upaya untuk keberlanjutan/peningkatan animo calon mahasiswa.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir namun trennya menurun.	UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	
			Skor = (A+B+C)/3					
64	Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Ketersediaan Sumber Pembelajaran (publikasi, riset penelitian, tesis/disertasi) 2) Kualitas Layanan pada Pembimbingan Tesis 3) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan.	Jenis layanan mencakup 3 aspek	Jenis layanan mencakup 2 aspek	Jenis layanan hanya pada 1 aspek	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	Tidak ada nilai 0	
		B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk 3 aspek.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk 2 aspek.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk 1 aspek.	Tidak ada akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Tidak ada nilai 0	
			Skor = (A + (2xB))/3					
65	Biaya Operasional Pendidikan	Biaya operasional pendidikan. Tabel 21 DAPS B_{OP} = Biaya operasional pendidikan dalam 3 tahun terakhir. N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. D_{OP} = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun	Jika $DOP \geq 20$, maka Skor = 4	Jika $DOP < 20$, maka Skor = $DOP / 10$				

		dalam 3 tahun terakhir	Skor = BOP / 3 / NM				
66	Dana penelitian DTPS	Dana penelitian DTPS. Tabel 21 DAPS	Jika DPD ≥ 10 , maka Skor = 4	Jika DPD < 10 , maka Skor = $(2 \times \text{DPD}) / 5$	DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).		
67	Dana PkM DTPS	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 21 DAPS	Jika DPkMD ≥ 5 , maka Skor = 4	Jika DPkMD < 5 , maka Skor = $(4 \times \text{DPkMD}) / 5$	DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).		
68	Realisasi investasi	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridharma. Catatan: Jika Skor rata-rata butir tentang profil dosen, sarana, dan prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta memenuhi standar pembelajaran, penelitian dan PkM.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana kurang sesuai dengan perencanaan investasi.	Tidak ada realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana.
69	Kecukupan dana	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian CP.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma dan sebagian kecil pengembangan.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan.	Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.
70	Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	TKM $\geq 75\%$	Jika $25\% \leq \text{TKM} < 75\%$, maka Skor = $(8 \times \text{TKM}) - 2$		Jika TKM $< 25\%$, maka Skor = 0	

		<p>Tabel 22 DAPS</p> <p>Aspek yang diukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keandalan (<i>reliability</i>): kemampuan dosen, Tendik, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (<i>responsiveness</i>): kemampuan dari dosen, Tendik, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (<i>assurance</i>): kemampuan dosen, Tendik, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (<i>empathy</i>): kesediaan/kepedulian dosen, Tendik, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) <i>Tangible</i>: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana. 	<p>Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di \quad i = 1, 2, \dots, 7$ di mana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".</p>			
$TKM = \sum TKMi / 5$						
<p>B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p>	<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan</p>	<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan</p>	<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.</p>	<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan</p>	<p>Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.</p>	

			menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	peningkatan hasil pembelajaran.		secara insidental.	
			Skor = $(A + (2 \times B))/3$				
DAMPAK							
71	Rekognisi DTPS	1) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang PS.. Tabel 23 DAPS	Jika RRD $\geq 0,5$, maka Skor = 4 .	Jika RRD $< 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times \text{RRD})$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
<p>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:</p> <p>a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/PT terakreditasi A/Unggul atau program studi/PT internasional bereputasi.</p> <p>b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.</p> <p>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.</p> <p>RRD = NRD / NDTPS</p> <p>NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>							

72	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 3 aspek.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1.	UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerja sama.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
----	--	--	--	--	--	---	-------------------------------

D. DIFFERENSIASI

MASUKAN

73	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan UPPS dan PS dalam mewujudkan diferensiasi misinya	A. UPPS dan PS memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	UPPS dan PS memiliki diferensiasi misi yang sangat jelas, realistis, dan relevan dengan kebutuhan stakeholders, serta telah diimplementasikan secara konsisten, memberikan dampak positif yang terukur pada pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat.	UPPS dan PS memiliki diferensiasi misi yang jelas, realistis, dan relevan, serta telah diimplementasikan dalam program dan kegiatan akademik, meskipun dampaknya belum optimal.	UPPS dan PS memiliki diferensiasi misi yang cukup jelas dan realistis, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten atau relevan dengan kebutuhan pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat.	UPPS dan PS memiliki diferensiasi misi yang terdokumentasi, tetapi misi tersebut tidak sepenuhnya jelas atau realistis, serta tidak relevan dengan visi dan kebutuhan stakeholders.	UPPS dan PS tidak memiliki diferensiasi misi yang jelas, realistis, atau terdokumentasi secara formal.
----	--	---	--	---	--	---	--

		B. PT memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui benchmarking. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	PT memiliki dokumen rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang sangat jelas, komprehensif, dan relevan, mencakup rencana jangka panjang, menengah, dan pendek, dengan indikator dan target terukur yang disusun melalui benchmarking, serta strategi pencapaian yang sistematis, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata pada pencapaian visi dan diferensiasi misi.	PT memiliki dokumen rencana strategis dan peta pengembangan yang lengkap, mencakup rencana jangka panjang, menengah, dan pendek, dengan indikator dan target yang terukur dan selaras dengan diferensiasi misi, serta strategi pencapaian yang cukup sistematis.	PT memiliki dokumen rencana strategis yang mencakup sebagian besar aspek (rencana jangka panjang, menengah, pendek), tetapi indikator dan target belum sepenuhnya selaras dengan diferensiasi misi atau strategi pencapaian masih bersifat umum.	PT memiliki dokumen perencanaan strategis yang sangat terbatas, mencakup salah satu dari rencana jangka panjang, menengah, atau pendek, dengan indikator yang belum terukur atau strategi pencapaian yang tidak sistematis.	PT tidak memiliki dokumen rencana strategis atau peta pengembangan institusi, dan tidak ada bukti perencanaan yang mendukung diferensiasi misi atau pencapaian visi.
				Skor = (A + (2 x B))/3			
74	Penerapan Global Code of Ethics for Tourism/ Sustainable Development Goals (SDG's)	Penerapan Global Code of Ethics for Tourism di dalam kegiatan UPPS dan PS untuk prodi pariwisata;	Ada penerapan 8-10 butir Global Code of Ethics for Tourism di lingkungan PS yang didukung dokumentasi sah.	Ada penerapan 5-7 butir Global Code of Ethics for Tourism di lingkungan PS yang didukung dokumentasi sah.	Ada penerapan 1-4 butir Global Code of Ethics for Tourism di lingkungan PS yang didukung dokumentasi sah.	Belum ada upaya menerapkan Global Code of Ethics for Tourism di lingkungan PS.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
		Penerapan Sustainable Development Goals (SDG) di dalam kegiatan UPPS dan PS untuk prodi non pariwisata	Ada penerapan 8-10 butir SDG's di lingkungan PS yang didukung dokumentasi sah.	Ada penerapan 5-7 butir SDG's di lingkungan PS yang didukung dokumentasi sah.	Ada penerapan 1-4 butir SDG's di lingkungan PS yang didukung dokumentasi sah.	Belum ada upaya menerapkan SDG's di lingkungan PS.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
PROSES							

75	Strategi pencapaian Tujuan	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektivitasnya.	Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metode yang relevan.	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.
LUARAN							
76	Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek.	UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi.	UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.
DAMPAK							

77	Kepuasan pemangku kepentingan	<p>Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan reviu terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. 	UPPS melakukan pengukuran kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen yang memenuhi seluruh aspek.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen yang memenuhi aspek 1 s.d 4 dan salah satu dari aspek 5 atau aspek 6.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen yang memenuhi aspek 1 s.d 4.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan kepada sebagian pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen yang memenuhi aspek 1 s.d. 4.	UPPS tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen.
E. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
78	Indikator Kinerja Tambahan	PS memiliki Indikator Kerja Tambahan pada aspek Penjaminan Mutu dan Tridharma PT	PT memiliki Indikator Kinerja Tambahan pada aspek Penjaminan Mutu dan Tridharma PT dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	PT memiliki Indikator Kinerja Tambahan pada aspek Penjaminan Mutu dan Tridharma PT dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	PT tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

F. PROFILE							
79	Profil UPPS	<p>Profil UPPS</p> <p>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.</p>	<p>Profil UPPS:</p> <p>1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,</p> <p>2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan PS.</p> <p>3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan PS.</p> <p>4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.</p>	<p>Profil UPPS:</p> <p>1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,</p> <p>2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan PS.</p> <p>3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan PS.</p>	<p>Profil UPPS:</p> <p>1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,</p> <p>2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan PS.</p>	<p>Profil UPPS:</p> <p>1) kurang menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,</p> <p>2) kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan PS.</p>	<p>Profil UPPS tidak menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.</p>
G. RENCANA PENGEMBANGAN							
80	Analisis dan Capaian Kinerja	<p>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.</p>	<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <p>1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu PT) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.</p> <p>2) konsisten dengan</p>	<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <p>1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu PT) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang belum terintegrasi.</p> <p>2) konsisten dengan</p>	<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <p>1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu PT) dan berkualitas (andal dan memadai).</p> <p>2) konsisten dengan sebagian kriteria yang diuraikan sebelumnya,</p> <p>3) analisisnya dilakukan secara</p>	<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:</p> <p>1) analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu PT) dan berkualitas (andal dan memadai).</p> <p>2) konsisten dengan sebagian</p>	<p>UPPS tidak melakukan analisis capaian kinerja.</p>

			<p>seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.</p>	<p>sebagian besar kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif dan tepat untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal serta mudah diakses.</p>	<p>komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal.</p>	<p>kecil kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya tidak dipublikasikan.</p>	
81	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi 	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan 3) merumuskan strategi 	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, dan 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja. 	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS, dan 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan tidak 	<p>UPPS tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi.</p>

			<p>pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan</p> <p>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.</p>	<p>pengembangan UPPS yang berkesesuaian.</p>		<p>sistematis.</p>	
82	Program Pengembangan	<p>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.</p>	<p>UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang 	<p>UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, dan 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal. 	<p>UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, dan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku. 	<p>UPPS menetapkan prioritas program pengembangan namun belum mempertimbangkan secara komprehensif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS, dan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku. 	<p>UPPS tidak menetapkan prioritas program pengembangan.</p>

			menjamin keberlanjutan.				
83	Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program.	UPPS tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program.